

MELAWAN DOMINASI PIKIRAN

BASIS

menembus fakta

TOLERANSI:
Cukupkah Itu?

Pendidikan
Anteseden

Nelangsa Drupadi,
Mendendam
Kuasa Lelaki

seni patung tekstil
A MAN AND BIRDS, 2016
karya TINA WAHYUNINGSIH

Rp 25.000.00

DUA BULANAN, NOMOR 03 - 04, TAHUN KE-66, 2017

JURNALISME SERIBU MATA

BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

B. Hari Juliawan

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Administrasi/ Distribusi

Maria Dwijayanti

Agustinus Mardiko

Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta

No. 0370285110 a.n. Sindhunata

BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / Sindhunata

Bahaya Politik Identitas ... 2

KACABENGKALA / A. Sudiarja

Ketika Dunia Cenderung Terpecah-pecah ... 4

BASIPEDIA / Heru Prakosa

Toleransi: Cukupkah? ... 14

BASIPEDIA / A. Bagus Laksana

Melawan Dominasi Pikiran.

Pendekatan Visual dalam

Kajian Agama Kontemporer ... 17

PENDIDIKAN / Johanes Eka Priyatma

Sekolah sebagai Anteseden ... 20

PENDIDIKAN / Lucia Ratih Kusumadewi

Membangun Budaya Literasi ... 23

BUKU / Hanputro Widyo

Imajinasi di Kamus ... 30

BUKU / Setyaningsih

Nelangsa Drupadi,

Mendendam Kuasa Lelaki ... 32

BUKU / Bandung Mawardi

Berlagu Indonesia Masa Lalu ... 34

SASTRA / Dian Vita Ellyati

Gabriel Garcia Marquez:

Penjaga Jembatan

antara Sihir dan Realitas ... 36

PUISI / Sindhunata

Koh Put On, Anak Betawi ... 46

CERPEN / Santi Almufaroh

Talnovo ... 51

100 Tahun HB Jassin / Fauzi Sukri

Penularan Jassin ... 56

Lukisan / Sindhunata

Bulan dari Telur ... 58




Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta ☎ 513873



Kami melayani:

- * Reservasi e-tiket pesawat dalam dan luar negeri
- * Reservasi e-tiket kereta api
- * Reservasi e-voucher hotel dalam dan luar negeri
- * Paket tour dalam dan luar negeri
- * Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC

- * MICE
- * Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan
- * Medical evacuation & charter flight
- * Money changer



Ketika Dunia Cenderung Terpecah-terpecah

A . S U D I A R J A



Tampaknya sejarah agama-agama (*religions*), memperlihatkan perpecahan sudah sejak awal perkembangannya. Perpecahan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang berdarah-darah, penganiayaan, pengusiran, dan peperangan berawal dari perbedaan pandangan, penafsiran teks, atau kepentingan lain.

Pertentangan ini tidak saja menyangkut “agama” yang satu terhadap “agama” lain yang berbeda, tetapi bahkan dalam sesuatu agama pun, pertentangan bisa terjadi dan menghasilkan perpecahan. Itulah sebabnya, dalam sejarah agama-agama dikenal istilah aliran, bidaah, sekte, skisma, kafir, dan lain-lain, yang memperlihatkan nuansa perbedaan dan permusuhan. Sesuatu agama, aliran, sekte baru muncul menggantikan, memperbarui atau menafikan agama lama, ketika dasar-dasar kesamaannya seolah-olah hilang, karena tertutup oleh perbedaan-perbedaan manifestasi kultural yang beraneka ragam menyangkut sektor politik (kekuasaan), ekonomi (kekayaan) dan filsafat (sudut pandangan).

Apakah kecenderungan persaingan dalam mendaku kebenaran dan mengelola pengikut itu merupakan mentalitas agama pada “masa lampau”, atautkah memang termaktub dalam hakekat “dakuan kebenaran” (*truth claim*) dari agama itu sendiri, yang sifatnya mutlak, sehingga mustahil toleran terhadap “dakuan kebenaran” dari pihak lain? Bila pengandaian yang pertama benar, maka hal ini menimbulkan ironi dan pertanyaan besar yang harus dijawab oleh agama-agama, yang merasa masih bertahan hingga “zaman sekarang”.

Persoalannya, mampukah mereka menghentikan pertikaian dan hidup bersama dengan damai, sesuai dengan tuntutan mentalitas “zaman sekarang”? Akan tetapi bila pengandaian kedua yang benar, maka persaingan dan pertikaian sebagai akibatnya tak akan pernah bisa dihentikan, selama mereka hidup bersama. Hal ini mengundang persoalan filsafat mengenai hakikat komunikasi: apakah komunikasi merupakan hal yang mustahil terjadi di dunia ini? Jawaban terhadap persoalan ini tidak akan cukup diuraikan hanya dalam satu ulasan karangan. Oleh karena itu, karangan ini membatasi diri hanya akan menyinggung persoalan dalam pengandaian yang pertama.

Sketsa perpecahan agama-agama

Risalah perpecahan agama-agama dapat dibaca dari berbagai buku sejarah agama-agama di dunia. Dalam

bukunya *The Battle for God* (2000), misalnya, Karen Armstrong melukiskan, munculnya fundamentalisme dalam agama-agama Abrahamik: Yudaisme, Kristiani, dan Islam. Agama-agama ini berkembang bukan tanpa pertentangan dan persaingan dalam diri mereka sendiri. Perbedaan penafsiran dan pengajaran mengenai ketuhanan dan pendakuan kebenaran sering menjadi alasan, meski tidak jarang juga karena alasan politik dan kekuasaan, atau kedekatan dengan penguasa yang sedikit banyak mempengaruhi juga pemahaman mereka dalam agama. Dalam *A History of God* (New York, 1993) yang ditulis tujuh tahun sebelumnya, Armstrong melukiskan perkembangan paham ketuhanan dari masing-masing agama itu, dari zaman ke zaman, dari Yudaisme yang paling awal, di mana paham Allah yang esa muncul di antara kepercayaan-kepercayaan akan dewa-dewi dari suku-suku bangsa di wilayah Palestina pada masa lalu, sampai ke pemahaman mistik dan filsafat Barat tentang Allah.

Menurut Armstrong, konsep tentang Allah bergeser dari zaman ke zaman, dalam pemikiran orang-orang itu, sehingga menimbulkan perubahan atau perkembangan agamanya. Dalam kata pengantarnya Armstrong menuliskan, “... This book will not be a history of the ineffable reality of God itself, which is beyond time and change, but a history of the way men and women have perceived him from Abraham to the present day” Oleh karena itu, kalau seseorang berkata “Aku percaya akan Allah” (*I believe in God*), kata-kata itu tidak mempunyai makna objektif, tetapi seperti halnya pernyataan lain, maknanya terikat pada konteks komunitas di mana ia menyatakan kata-kata itu. Seorang fundamentalis, lanjut Armstrong akan menyangkal pemahaman ini, karena fundamentalisme menurutnya anti-sejarah, dia yakin bahwa Abraham, Musa, dan nabi-nabi yang lain semua mengalami Allah mereka sama persis dengan cara kita sekarang mengalaminya (Armstrong, 1993: xx).

Dalam *The Battle for God*, Armstrong lebih tajam memperlihatkan bagaimana perbedaan-perbedaan persepsi mengenai Tuhan dan hal-hal lainnya yang berkembang, telah menimbulkan perpecahan yang keras, tidak saja antaragama, melainkan dalam masing-

masing agama itu sendiri. Dalam Islam, perpecahan awal antara Suni dan Syiah terjadi karena memperebutkan kekhalifatan, diwarnai dengan intrik dan pembunuhan, padahal menurut Armstrong di antara keduanya tidak ada perbedaan ajaran yang berarti (Armstrong, 2000: 45-48). Dalam Kristianisme, perpecahan itu tampaknya jauh lebih rumit dan panjang, diwarnai dengan peperangan antara para raja yang mengakibatkan perpecahan banyak Gereja, sampai dengan munculnya fideisme, keyakinan akan adanya Allah secara rasional, tetapi tak ada campur tangan Allah dalam sejarah sehingga agama berubah menjadi filsafat yang sekuler.

Persoalan tentang kedudukan Yesus dan kepemimpinan tunggal Sri Paus, juga menjadi pokok pertikaian dari berbagai Gereja Kristen, mula-mula di Eropa, kemudian juga sampai di Amerika (Armstrong, 2000: 61). Akan tetapi dari lain pihak, persaingan, terutama pengejaran dan kekerasan yang dialami kelompok-kelompok minoritas di wilayah mayoritas, sebetulnya juga memunculkan gerakan-gerakan pembaruan, terutama dalam bentuk-bentuk mistik, seperti mistik Kabbalah Yahudi, karena penindasan Kristiani di Spanyol. Di kalangan Islam Sunni berkembang puritanisme untuk menentang pengaruh Barat, munculnya sufi di Marokko dan lain sebagainya.

Orang-orang skeptis dan ateis sudah lama mencurigai, jangan-jangan agama itu menyembunyikan keburukan manusia, tetapi dengan kedok ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan, menampilkan citra, yang mengelabui kenyataan yang sebenarnya. Pandangan skeptis seperti dikemukakan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu bagaikan serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*) seolah meneguhkan kenyataan ini. Wajah-wajah serigala berbulu domba dapat disaksikan dalam ajaran-ajaran kebencian yang tanpa sadar muncul dalam orasi-orasi agama untuk mengalahkan, menundukkan dan kalau perlu memusnahkan yang lain. Bagaimana kehidupan bersama dapat diselenggarakan dalam suasana seperti itu? Benarkah pendapat Hobbes, bahwa kedamaian sosial hanya bisa dipaksakan melalui kekerasan Negara, yang dibentuk melalui kontrak sosial? Pada akhir bukunya yang merunut fundamentalisme agama tersebut, Armstrong menyertakan wawancaranya dengan Jonathan Kirsch, seorang kolumnis buku terkenal dari *Los Angeles Times*. Ia mengatakan bahwa fundamentalisme merupakan reaksi ketakutan agama terhadap modernitas, tetapi menurut Armstrong fundamentalisme juga menjadi tanda, - bahwa ramalan



kaum sekuler mengenai hilangnya peran agama di dunia modern tidak terbukti. Fundamentalisme akan selalu ada. Namun bagi Armstrong fundamentalisme juga memperlihatkan kekalahan, karena ia mengingkari rasa kasih (*compassion*) yang merupakan nilai tradisi yang diutamakan setiap agama (Armstrong, 2000: *a reader's guide*/ tanpa halaman).

Persoalan fundamentalisme agama, kalau ini bisa dianggap sebagai faktor penyebab perpecahan dan pertentangan agama, dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap "agama" memang mempunyai dua aspek,



Harun, "Republik Mimpi", akrilik di atas kanvas, 180 x 140 cm, 2016

yaitu aspek esensi dan aspek manifestasi. Esensi agama sebagai kebenaran yang diwahyukan memang bersifat absolut dan tetap, tidak berubah, akan tetapi manifestasinya bersifat historis karena berada di dunia dan zaman yang berbeda-beda. Agama yang nyata diwujudkan oleh manusia-manusia dari wilayah dunia budaya dan kurun waktu berbeda, mengakibatkan pula perbedaan pandangan, sikap, keputusan-keputusan yang menghasilkan pertikaian, pertentangan dan perpecahan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, setiap agama mengalami kesulitan, dalam menyatakan kebenaran

absolutnya. Dalam hal inilah orang-orang beragama ditantang untuk menafsir ulang pernyataan dan sikap-sikapnya dalam kehidupan bersama.

Dari Eksklusivisme ke Pluralisme Agama

Pada tahun 1970-an di Eropa berkembang diskusi tentang "pluralisme agama", yang mencoba mengatasi persoalan adanya banyak agama di dunia. Wacana tersebut didukung oleh perkembangan Teologi Agama-agama (*Theology of Religion, Theologia Religionum*) yang memilah-milah agama dalam tiga macam disposisi



dalam relasinya dengan agama-agama lain, yakni eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Secara ringkas, eksklusivisme dapat dikatakan sebagai sikap agama yang membenarkan agama “rumah sendiri”, seraya menafikan agama-agama lain; inklusivisme merupakan sikap agama yang menerima agama lain, tetapi memasukkannya dalam payung subordinasi agama

“rumah sendiri”, sedangkan pluralism merupakan sikap yang mulai menghargai agama-agama lain setara dengan agamanya sendiri. Tentu saja, masing-masing disposisi ini masih mempunyai varian yang banyak, dari yang paling keras hingga yang paling lunak dan mempunyai keunggulan dan persoalannya masing-masing (Lih. Harold G. Coward, *Pluralism: challenge to world*

religion, Orbis Books, 1985. Bdk. Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius, 1994: 18-24). Selain itu dimungkinkan pula sikap-sikap kombinasi seperti inklusip-pluralis, yang memuat pemikiran antara kedua disposisi itu.

Pada tahun 1980-an, James Fredericks dan Francis X. Clooney menulis buku *The New Comparative Theology* yang mengemukakan cara baru dalam memahami perbandingan agama. Cara pendekatannya berbeda dari Teologi Agama-agama. Buku itu dianggap mengawali gerakan baru dalam mencari kesamaan agama-agama, melalui perbandingan dan refleksi kritis baik dari teks-teks Kitab Suci maupun praksis agama-agama yang berbeda. Harus dikatakan bahwa pluralisme bukanlah sikap atau pandangan relativis belaka, yang menyamakan begitu saja semua agama, seolah-olah tidak mempunyai dakuan kebenaran (*truth claim*) agama “rumah sendiri”, sebagaimana sering disalahpahami oleh umat sederhana.

Kalau dipikirkan dengan lebih jernih, terasa bahwa pengakuan atas kesetaraan agama-agama tidak berbeda dengan pengakuan kesetaraan hak-hak asasi. Tentu saja pengakuan ini tidak berarti merelatifkan hak asasi saya. Pandangan simplistik semacam ini keliru dan bisa mematahkan iman umat yang lemah atau sebaliknya menjadikannya fanatik, untuk melawan pluralisme. Dari lain pihak barangkali mereka tidak mampu mengikuti wacana teologi yang canggih, untuk bisa memahami maksud “pluralisme” yang mempunyai banyak varian dalam pemikiran. Oleh karena itu, merupakan tuntutan bagi para pemuka agama untuk menjadi kompeten dalam “pluralisme”, terbuka dalam dialog, agar dapat menjelaskan urgensi “pluralisme” bagi kepentingan umat.

Dalam teologi Kristen kemampuan ini disebut kefasihan berteologi (*theological literacy*) (Bdk. Robert Cumming Neville, “On the Complexity of Theological Literacy” dlm. Rodney L. Petersen with Nancy M. Rourke (ed.), *Theological Literacy for the Twenty-First Century*, Cambridge: William B. Erdmans Publishing Company, 2002: 39). Ibarat tuntutan kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet untuk para siswa sekolah pada zaman sekarang agar dapat terlibat dalam kehidupan media sosial, “kefasihan teologis” merupakan tuntutan *sine qua non* untuk berdialog agar mampu menghayati agama pada zaman sekarang. Dari lain pihak, dialog agama itu sendiri merupakan sarana dan praktik untuk belajar dan mengembangkan teologi.

Bisa dibayangkan bahwa tanpa usaha dialog, mustahil orang mampu memahami agama lain secara benar, karena tanpa dialog, teologi hanya akan berkutat pada spekulasi dan imajinasi agama “rumah sendiri” mengenai agama lain dan karenanya akan keliru mengartikulasikan sikap “pluralisme” dalam meletakkan disposisi agamanya sendiri. Tentu saja, yang diharapkan sebagai hasil dialog agama, bukanlah kesepahaman, ataupun kesepakatan, melainkan saling-pengertian di antara agama-agama. Menurut Raimundo Panikkar, dialog yang baik akan menyuburkan dan memperkaya, bukannya menggoyahkan dan melemahkan iman umat dari agama “rumah sendiri”. Dialog antaragama diharapkan bisa mendorong dialog “intra-religius” (Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius, 1994).

Hal ini mengandaikan bahwa dalam masing-masing agama pun sudah ada perbedaan, tetapi dimungkinkan dialog. Jadi kiranya merupakan suatu peningkatan kesadaran, bila dimungkinkan dialog juga dengan agama lain, yang bisa menghasilkan pembaruan atau reformasi teologi dan agama “rumah sendiri” dan mendewasakan iman umat. Dari sini tampak bahwa “pluralisme” sekali lagi, bukan paham monolit yang satu dan sama pengertiannya untuk semua, melainkan sebagaimana arti namanya, ada banyak varian tentang “pluralisme”, sebanyak atau bahkan lebih banyak daripada agama-agama yang mau berdialog.

Tetapi memang ada beberapa persoalan yang menjadi faktor kesulitan, kalau bukan hambatan, untuk melakukan dialog agama dan bersikap pluralis. Pertama adalah “bahasa teologi” atau “bahasa agama” seperti sudah disinggung di depan. Setiap teologi dan agama mempunyai bahasanya sendiri masing-masing, sehingga menjadi persoalan bisakah teologi/agama melakukan dialog untuk saling memahami? Bahasa teologi yang erat dengan agama “rumah sendiri” mempunyai lingkaran hermeneutik yang terbatas hanya untuk umat dari agama yang bersangkutan. Bahasa teologi/agama, ibarat bahasa nasional dari berbagai bangsa, masing-masing mempunyai otonominya sendiri, yang dalam pengertian filsafat, sifatnya “equivok” (setara) bukan “univok” (seragam).

Pengertian “Yang Transenden” misalnya begitu berbeda dari satu agama ke agama yang lain, bahkan maksud transendensi itu sendiri pun tidak seragam. Akan tetapi, jikalau antarbahasa nasional dimungkinkan saling memahami melalui penerjemahan satu sama lain, dalam hal agama tampaknya tidak dimungkinkan

penerjemahan, orang harus masuk ke dalam jantung agama lain. Selain bahasa sebagai model antropologi, Raimundo Panikkar dalam buku yang kita rujuk diatas, juga melukiskan pluralisme agama dalam dua model lainnya: pelangi (model fisika) dan invarian topologis (model geometri) (Raimundo Panikkar, *Opcit.* 1994: 24-29).

Karena kesulitan ini, dialog agama tampaknya memerlukan juga simpati agar bisa menaruh hati pada pemeluk agama lain, karena “hati” kata B. Pascal, “mempunyai penalaran yang tidak dimiliki dalam akal-budi”.

Masalah berikutnya adalah, bagaimana merumuskan kebenaran agama sendiri di satu pihak dan mengakui kesetaraan di lain pihak. Ada suatu paradoks dalam “pluralisme” yang harus diterima, untuk tidak membuatnya menjadi sekadar “relativisme”. Untuk itu *pluralism* memerlukan kemampuan mendengar dengan sabar, memahami dengan baik, berpikir dan mengutarakan pandangan dengan jelas dan cerdas, bersikap santun dan seimbang. Akan tetapi apakah kemampuan seperti ini, bukannya bagian dari tuntutan etis profesional para pemuka agama? Setiap profesi dewasa ini mempunyai etika profesinya, demikian pun para pemuka agama untuk bisa dianggap “profesional” perlu mengembangkan etikanya sendiri. Kesederhanaan umat biasa sering sekadar ingin tahu perintah dan larangan agama, lalu menjalankannya. Padahal *pluralism* pelan-pelan mengajak seluruh umat, tidak hanya para pemuka agama, pada akhirnya harus ikut memikirkan bagaimana menjalankan pergaulan agama dunia zaman sekarang dengan sebaik-baiknya (Rodney L. Petersen with Nancy M. Rourke (ed.), 2002 : 39.).

Masih ada banyak pertimbangan yang lain. Dengan wawasan yang lebih luas, jikalau orang mau mengembangkan pemikiran dan tidak hanya mengacu pada ajaran masa lampau yang membeku, maka setiap ajaran yang baik pada masa lampau pun, akan dipikirkan ulang implikasi praktisnya untuk zaman sekarang. Semisal ada ajaran-ajaran mengenai perbudakan dalam Kitab Suci, atau penggunaan cara-cara kekerasan yang duku dianggap biasa, sementara zaman sekarang perbudakan dan kekerasan dianggap sesuatu nilai negatif yang merendahkan manusia, maka wawasan yang baik akan menafsir ulang maksud Kitab Suci, sehingga ajarannya tidak akan bertentangan dengan moralitas baik yang diakui umum (manusia) zaman sekarang.

Jadi pluralisme bisa saja belum mendapatkan rumusan yang mapan, tetapi tidak serta-merta harus ditolak dan dianggap merelativasikan keyakinan iman. Bagaimana teologi memikirkan penalaran yang bisa menguraikan arti pluralisme tanpa mengurangi kekhususan atau keistimewaan sesuatu ajaran agama. Jikalau belum mendapatkan rumusannya, pluralisme setidaknya sudah harus menjadi wacana untuk dipertimbangkan dan dipikirkan, ketika eksklusivisme dan inklusivisme tidak cukup memberikan jalan keluar lagi untuk kehidupan bersama pada zaman sekarang.

Jikalau agama-agama mempunyai intensitas yang baik dalam kehidupan bersama, maka dari sudut pandang “pluralis”, memang terjadi perkembangan pemikiran dari eksklusivisme, inklusivisme ke “*pluralism*”, karena pandangannya semakin terbuka, objektif, simpatik, dan penuh toleransi. Kenneth Rose dalam *Pluralism: The Future of Religion* (New York, Bloomsbury, 2013) beranggapan bahwa “pluralisme” tak terelakkan akan menjadi sikap agama pada masa depan. Optimisme ini menurutnya “... tidak berdasarkan pada filsafat sejarah yang progresif, melainkan pada hukum perubahan yang tak pernah bisa dibatalkan, yang juga berlaku dalam sejarah, biologi, hancur dan banggunya kembali alam semesta. Hukum yang juga berlaku dalam hidup berkeluarga dan bertetangga, dalam urusan bangsa-bangsa dan pemerintahan, dan bahkan pada kebenaran-kebenaran yang dianggap tak bisa berubah dari filsafat dan agama.” Pernyataan ini mengundang pertanyaan, apakah perubahan ke “pluralisme” bukannya merupakan perkembangan kehendak baik manusia? Ataukah penulis buku itu mau menyamakan kehendak baik sebagai hukum perubahan yang berlaku dengan sendirinya? Apakah perubahan sikap “pluralis” dalam beragama merupakan kehendak bebas, ataukah keniscayaan hukum alam, itulah soalnya (Kenneth Rose, *opcit.* 2013: 2. Bdk pernyataan Karl Rahner yang terkenal bahwa agama-agama harus menjadi mistik di masa depan, kalau masih mau bertahan).

Dari puralisme ke multikulturalisme

Dewasa ini wacana tentang pluralisme agama rupanya mulai surut digantikan dengan wacana mengenai multikulturalisme. Mungkin karena multikulturalisme boleh dikata merangkum juga persoalan agama. Dari segi antropologi budaya, agama dianggap sebagai salah satu unsur budaya di samping politik, ekonomi, seni, ilmu, dan teknologi. Maka

persoalan agama dapat dimasukkan dalam kerangka persoalan budaya. Meski ada beberapa unsur budaya selain agama (St. Takdir Alisyahbana, *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-Nilai* [1977]), namun tidak semua unsur berperan sama dalam zaman dan wilayah yang berbeda, bahkan tidak mustahil dalam satu era dan di suatu wilayah tertentu, satu unsur mendominasi unsur-unsur lainnya dan menjadi penentu kebesaran budaya setempat.

Multikulturalisme sebagai kebijakan politik suatu negara bisa muncul dari kenyataan adanya pluralitas budaya. Indonesia adalah contoh yang jelas dari suatu negara di mana berbagai budaya berbeda bisa hidup bersama dalam satu kesatuan. Agama-agama, termasuk agama-agama lokal dalam arti ini juga merupakan bagian dari budaya. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kejadian yang luar biasa, sebab di situ terungkap tekad para pemuda “Indonesia” dari berbagai latar belakang budaya berbeda, untuk hidup bersama, bersatu dalam satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa, dengan kata lain dalam sebuah negara yang sama, bahkan ketika secara *de iure* negara tersebut itu belum ada. Ikrar ini asli dari putra-putra daerah, bukan rekayasa dan mendahului kesepakatan politis pembentukan dasar Negara Pancasila. Secara politis Indonesia disebut Negara kesatuan, akan tetapi lebih dari sekedar sistem politik, dari Sumpah Pemuda itu tampak bahwa kesatuan itu dijiwai oleh semangat asli para pendirinya, yang muncul dari kehendak sendiri.

Namun pada zaman modern ini tak terelakkan pula masuknya berbagai unsur budaya dari luar Indonesia, yang dibawa oleh para pendatang, suatu hal yang berlaku juga di negara-negara lain. Perpindahan penduduk melalui kedatangan dan kepergian orang dari satu negara ke negara lain dewasa ini semakin sering terjadi dan dengan itu pula pertemuan antar budaya. Belakangan ini perang di Timur Tengah telah mendorong perpindahan para pengungsi besar-besaran, tidak saja ke negara-negara tetangga dekat, tetapi bahkan jauh ke Eropa, yang latar belakang budayanya sangat berbeda.

Perpindahan besar-besaran ini tentu saja mempunyai dampak perjumpaan kultural yang semakin nyata dari budaya yang sangat berbeda, yang akan menentukan politik “multikulturalisme”. Di Eropa sendiri isu multikulturalisme sudah lama muncul. Kaum liberal pada umumnya merupakan pihak yang tidak suka dengan pengelompokan budaya, sebab bagi mereka masyarakat harus lebih memperhatikan individu

daripada kelompok-kelompok etnis dan agamis. Tetapi belakangan ini perkembangan demokrasi sudah sedemikian, sehingga kaum demokrat-liberal pun mulai menyetujui politik multikulturalisme, itu berarti mereka mengakui juga hak-hak komunitas-komunitas kecil yang hidup di tengah-tengah mereka.

Kelompok-kelompok minoritas etnis atau agamis di Eropa, biasanya mempunyai kekhususan-kekhususan yang ingin dilestarikan di tengah perkembangan masyarakat global. Oleh karena itu, masuk akal bila mereka membentengi diri dalam eksklusivisme kelompok dan menghindari pergaulan yang luas dengan individu atau masyarakat lainnya. Kaum liberal sebaliknya sangat mementingkan kebebasan dan kesetaraan individu sebagai nilai yang harus dibela.

Dari dua kepentingan yang berbeda inilah terjadi persoalan yang sering sulit untuk dipecahkan. Kelompok minoritas etnis atau agamis, yang membela nilai-nilai komunitas mereka, dalam pandangan kaum liberal bisa melanggar hak asasi dan keadilan, bila pembelaan dan pelestarian nilai-nilai komunitas itu sampai menindas kebebasan individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Misalnya perlakuan tidak adil kepada perempuan, kutukan terhadap kaum LGBT, atau pun ketidaksukaan dan intoleransi terhadap individu-individu yang mempunyai agama atau keyakinan lain; sebab bagi kaum liberal kebebasan dan kesetaraan berarti setiap individu diberi kemungkinan untuk berbeda paham dan keyakinan dengan kelompoknya tanpa mengalami kekerasan, sementara kelompok etnis sangat getol mempertahankan kesatuan kultural dengan mengancam ide-ide baru yang berbeda dari kelompok.

Inilah dilema kaum liberal, ketika mereka menerima politik “multikulturalisme” (Lih. Sarah Song, *Justice, Gender, and The Politics of Multiculturalism*, Cambridge: University Press, 2007 hlm. 41- 43; bdk. Anne Phillips, *Multiculturalism without Culture*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007 hlm. 11-16).

Konsep egalitarian dalam multikulturalisme yang diterima kaum demokrat-liberal tampaknya belum sangat tegas, apakah diberlakukan terhadap individu ataukah terhadap kelompok etnis/agamis. Sementara kelompok etnis/agamis mulai getol menyuarkan identitas suku atau agama mereka, kaum liberal terkesan tetap curiga terhadapnya.

Di Indonesia liberalisme tidak sangat berkembang, kecuali di kota-kota besar. Ikatan kekerabatan dalam

komunitas-komunitas etnis/agamis masih amat kuat. Jikalau Sumpah Pemuda 1928 mengikrarkan kesatuan Indonesia, maka di balik ikrar itu tersembunyi kewaspadaan terhadap kemungkinannya pertentangan antaretnis/agamis ini, bukan antarindividu. Tak dapat diingkari bahwa pertentangan semacam itu ternyata masih juga terjadi dan menimbulkan masalah sosial. Pertentangan antarindividu dalam masyarakat liberal biasanya lebih menyangkut ide atau gagasan saja, yang dilontarkan dalam media massa, dan persoalannya tidak sulit diatasi. Mereka bisa saling mengkritik dalam polemik di media sosial dan kritik yang dilontarkan sering berguna untuk kemajuan bersama. Pertentangan antarkomunitas etnis/agamis sebaliknya bisa sangat panas, karena sifat emosionalnya yang terkandung dalam pembelaan nilai-nilai identitas mereka. Larangan “Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA)” yang diangkat presiden Suharto pada era Orde Baru, merupakan ungkapan kekhawatiran semacam ini.

Akan tetapi selama ini pengertian SARA tampaknya tidak cukup dielaborasi atau diolah dalam praksis sosial. SARA menjadi tak lebih dari tabu yang pernah ditanamkan oleh sesuatu kekuasaan dalam kesadaran masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi dan orang takut menyentuhnya. SARA yang dipahami umum tampaknya hanya larangan, untuk tidak menyentuh nilai “identitas” kelompok etnis/agama lain, agar tidak menyinggung atau melukai kelompok mereka. Akan tetapi tidak pernah ada penjelasan manakah “identitas” yang sensitif semacam itu? Karena mereka dicegah untuk berdialog, maka yang terjadi justru kesalahpahaman, misalnya di wilayah-wilayah transmigrasi sehingga menimbulkan konflik komunitas. Pemahaman SARA yang demikian ini boleh dikata merupakan SARA minimalis atau SARA dalam arti negatif, mengikuti prinsip etis minimalis, sekadar asal tidak merugikan yang lain (*no harming principle*).

Dapatkah pemahaman SARA ini dikembangkan ke arah yang positif dan maksimalis, yakni dengan dialog antarsuku, agama, ras, aliran politik yang menjadi “identitas” setiap kelompok. Dalam tataran pluralisme agama, inilah dialog agama yang membuka saling pengertian dan pemahaman, yang memperkaya satu sama lain, yang dalam istilah Panikkar disebut “saling-menysuburkan” (*cross fertilization*) dan bukan sebaliknya, sehingga orang, - seperti Gus Dur -, bisa bercanda ringan tentang hal-hal keagamaan tanpa perasaan tersinggung. Pengalaman keagamaan memang

merupakan kekayaan kehidupan yang luar biasa, yang bisa dikembangkan dengan baik bila tanpa kecurigaan. Dialog agama bukanlah “pemerdayaan” melainkan “pemberdayaan” agama (A. Sudiarja, 2006: 41).

Bila demikian halnya maka Indonesia bisa menjadi contoh politik multikulturalisme yang baik.

Agama, kekerasan, dan politik identitas

Sejak Presiden Trump terpilih dan mengeluarkan keputusan menolak imigran dari tujuh negara Muslim yang mau masuk Amerika Serikat, media mengangkat maraknya isu populisme dan “politik identitas”. Presiden Trump hanyalah salah satu contoh kepemimpinan yang didukung oleh motivasi populis. Protes pun muncul di mana-mana. Di Inggris Nigel Farage, seorang anggota partai kanan (*United Kingdom Independence Party*) yang tidak sangat menonjol, tiba-tiba terkenal karena keberhasilannya membujuk masyarakat memenangkan pilihan untuk keluar dari Uni Eropa, suatu sikap yang ingin mempertahankan identitas Inggris dalam perbedaannya dengan Eropa pada umumnya. Di Italia, Perdana Menteri Matteo Renzi berhasil diturunkan dengan suatu referendum 4 Desember 2016, atas desakan partai-partai populis. Di Jerman, Merkel yang antusias menerima para pengungsi Timur Tengah mulai dikecam, bahkan ada poling yang menyatakan 42% rakyat Jerman sebetulnya menginginkan juga pisah dari Uni Eropa seperti Inggris. Pendek kata, belakangan ini bangkit gerakan politik di Eropa dan Amerika Serikat yang bersifat populis, yang ingin mengembalikan kejayaan nasional masing-masing negara (Simon Shuster/London, “How People Power is splitting Europe”, *Time*, Dec.19. 2016 hlm. 51-53). Kesatuan-kesatuan besar dan ikatan dengan negara-negara lain tidak mereka inginkan lagi, demi kebesaran bangsa sendiri. Slogan Trump dalam kampanye, “Make America Great Again!” membuat Amerika justru terbelah dan ia dijuluki majalah *Time* (Desember 19, 2016) sebagai “President of the Divided States of America”.

Apakah kekerasan di Myanmar, penganiayaan dan pengusiran orang-orang Rohingnya, fanatisme agama di Indonesia yang mendeskreditkan panganut lain, dan kekerasan Presiden Duterte di Filipina yang membunuh tanpa diadili mereka yang dicurigai pengedar narkoba, mempunyai kaitan dengan perkembangan situasi populisme dan maraknya identitas etnis, agamis, politis, kultural yang semakin mengeras? Perlawanan gigih untuk membela identitas diri dengan menyerang

lawan-lawannya tanpa kompromi, memang tampak menjadi kecenderungan politik belakangan ini, juga di Indonesia, terutama dalam Pilkada di Jakarta? Ciri dari perkembangan situasi ini ialah surutnya kemampuan dialog dalam politik secara santun, lebih mudah berkomentar dan bereaksi secara spontan, tidak jarang penuh dengan emosi kemarahan dan kebencian, terutama di media sosial, penggunaan cerita dan pernyataan bohong (*hoax*) untuk mengelabui, yang akhirnya lebih mendorong ke perpecahan daripada kesatuan.

Melihat berbagai persoalan relasional antara agama, budaya, politik, dan lain-lainnya yang berkembang hingga kini, seperti dipaparkan secara singkat di atas, karangan ini tidak ingin memberi kesimpulan, apalagi memberikan pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang begitu rumit tersebut, tetapi malahan menanyakan atau bertanya-tanya akan ke mana kiranya situasi masyarakat Indonesia ke depan? Apakah kita juga akan terbawa arus kecenderungan yang sama dengan mereka ataukah berani melawan arus dan menciptakan suasana baru? Mengingat masyarakat kita masih kuat dengan kecenderungan religius, apakah pemikiran-pemikiran mengenai “pluralisme agama” bisa dikembangkan di sini, sejalan dengan sila pertama Ketuhanan yang Mahaesa dari dasar Negara Pancasila? Jadi “Kesatuan” dan “Perpecahan” masyarakat apakah merupakan suatu kebebasan pilihan ataukah perkembangan hukum alam? Wallahu’alam. ●

Prof. A. Sudiarja,
STF Driyarkara, Jakarta.